



SUARA MERDEKA

Perekat Komunitas Jawa Tengah

SELASA WAGE, 9 JANUARI 2018
TAHUN 68 NO. 317 ■ TERBIT 28 HALAMAN

1

Jaringan Layanan Media Terlengkap di Jawa Tengah

Rp. 3.999



ANALISIS

Oleh Fitriyah



PDIP Belajar dari DKI

PARTAI
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menentukan sikap. Di luar adat kebiasaannya, kali ini PDIP memining kader parpol lain menjadi bakal calon wakil gubernur. Gubernur Petahana Ganjar Pranowo disandingkan dengan Taj Yasin.

Nama Ganjar Pranowo, barangkali semua masyarakat Jateng sudah tahu. Selain karena hampir lima tahun menjabat, intensitas *roadshow* agenda kedinasan di hampir semua wilayah di Jateng, menjadikan popularitasnya tinggi. Hasil survei beberapa lembaga survei independen maupun PDIP juga menempatkan namanya di urutan tertinggi.

Lalu apa keuntungan PDIP memasang Ganjar dengan Taj Yasin? Popularitas anggota Komisi E DPRD Jateng ini memang jauh di bawah Ganjar Pranowo atau bahkan nama-nama bakal calon lain yang sempat ditiming PDIP. Mungkin namanya sebatas populer di kalangan pesantren. Namun, nama sang ayah harus diakui yang menjadi nilai plus Yasin.

Yasin merupakan putra dari KH Maimun Zubair yang menjadi sosok simbol religius yang kuat. Simbol inilah yang saat ini sangat dibutuhkan oleh PDIP.

Memang di dalam partai berlambang banteng itu banyak kader-kader yang agamis. Namun nama PDIP sudah *kadung* lekat dengan sisi

(Bersambung hlm 7 kol 4)

PDIP...

(Sambungan hlm 1)

nasionalis. Karena itu, PDIP butuh simbol religius untuk menggaet kalangan religius khususnya pemilih yang beragama Islam. Kenapa kemudian simbol religius itu penting? Karena sisi inilah yang selama ini tak bisa disentuh PDIP. Bicara agama, bicara soal hati.

Saat pidato pemberian rekomendasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berulang kali menyampaikan soal isu-isu PKI. Bahkan ada pihak yang mengembuskan jika PKI merasuk di PDIP dan ini merupakan serangan pada PDIP. Maka dengan adanya bakal calon dari partai agamis dan memiliki simbol religius pada diri Mbah Maimun Zubair, serangan itu dengan sendirinya tertangkal.

Alasan kedua mengapa perlu simbol religius, PDIP menjadikan kekalahan pertarungan di Pilgub DKI sebagai catatan penting. Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang saat itu di atas kertas bisa memenangi pertarungan kenyataannya keok. PDIP sepertinya sadar, meski memiliki mesin politik kuat, basis massa yang pasti, hal itu bisa rontok dengan isu-isu yang menjatuhkan dan tersebar di media sosial. Kerja-karya konvensional yang selama ini dijalankan bisa saja menguap dalam hitungan jam akibat serangan melalui media sosial. Artinya, faktor media sosial akan berperan penting dalam pertarungan nanti. Tak menutup kemungkinan *ëimodelí* Pilgub Jakarta menyebar di Jateng.

Saya menilai saat ini sulit untuk mengendalikan isu-isu yang ada di media sosial. Apalagi jika sudah menjadi viral dan di-link, share, tweet banyak orang. Maka jika dulu dengan gampang mengukur kemenangan-kemenangan pilkada yakni dengan variabel kerja konvensional, saat ini cukup sulit. Hal itu tak hanya terjadi di Indonesia, kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton juga menjadi salah satu buktinya.

Soal pemilihan Taj Yasin yang berasal dari kader PPP (bukan PKB yang selama ini diprediksi), sepertinya PDIP ingin menggandeng semua parpol. Terlebih mengingat tahun ini sudah persiapan menyongsong Pilpres 2019. PDIP menggandeng PKB di Jatim dan di Jateng bersama dengan PPP.

Dengan mengusung gubernur petahana Ganjar

Pranowo, sepertinya PDIP ingin meyakinkan pada publik jika Ganjar bersih dari kasus E-KTP. Dalam menentukan calonnya, sudah barang tentu PDIP melakukan penelusuran soal kasus tersebut. PDIP tak akan bunuh diri dengan memberikan rekomendasi pada orang yang tersangkut kasus hukum, apalagi E-KTP, kasus besar yang jadi sorotan nasional dan nilainya triliunan rupiah.

Gembar-gembor kasus itu juga tak akan memengaruhi pemilih Jateng. Pertama, karena PDIP memiliki basis massa yang jelas. Loyalitas yang tinggi menjadi ciri khasnya. Apalagi jika sudah ada perintah Ketua Umum. Selanjutnya, basis massa ini menjadi mesin politik yang bertugas mengajak pemilih lain nyoblos Ganjar-Yasin.

Kalau ditanya soal peluang pasangan nasionalis-religius ini, saya tidak tahu pasti. Tapi yang jelas dalam pertarungan Pilgub, gabungan faktor figur dan mesin partai sangat penting. Kini kedua hal ini sudah dimiliki oleh PDIP.

Di manapun, dalam pertarungan Pilkada, peluang petahana lebih besar dari calon lainnya.

Jika koalisi parpol lain ingin mengalahkannya, maka langkah pertama adalah bertarung *head to head*. Jumlah pasangan calon lebih dari dua maka secara otomatis menguntungkan petahana. Apalagi di Jateng petahana diusung PDIP. Sejauh ini partai ini menjadi yang paling kuat, memiliki petahana dan kursi di DPRD Jateng terbanyak. Langkah selanjutnya adalah pasangan calon lain harus membuat program yang bagus dan memikat hati pemilih.

Melihat peta pertarungan saat ini, sepertinya ada kecenderungan *head to head*. Tapi bagaimana sikap PKB dan Golkar, apakah akan bergabung dengan koalisi yang dimotori PDIP atau Gerindra, itu tergantung lobi-lobi politik yang dilakukan petinggi partai. Pada sisi lain, peluang untuk membentuk poros baru juga tetap ada, lantaran jumlah kursi PKB dan Golkar 23 kursi yang melebihi syarat minimal mengusung pasangan calon yakni 20 kursi di DPRD Jateng. (67)

— Dra Fitriyah MA, Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Diponegoro